



# LAPORAN EVALUASI KINERJA TRIWULAN - 1

---

Tahun 2025

**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KABUPATEN LUWU TIMUR**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Azza Wa Jallah atas perkenaan-Nya sehingga Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Evaluasi Kinerja Triwulan I Tahun 2025 dengan baik.

Laporan Evaluasi Kinerja ini diharapkan dapat memberikan gambaran objektif tentang Kinerja yang telah dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik pada triwulan I Tahun 2025 dan dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi perencanaan Program dan Anggaran di tahun berikutnya.

Kami sadar bahwa laporan akuntabilitas ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu saran dan kritik yang sifatnya konstruktif sangat diharapkan untuk perbaikan di masa yang akan datang.

Akhir kata, kami ucapkan terima kasih banyak kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya Laporan Evaluasi Kinerja Triwulan I Tahun 2025 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur.

Malili, 07 April 2025

Kepala Badan,



GUNTUR HAFID, S.Pd., M.Si  
Pangkat : Pembina Tk. 1  
NIP. 19710502 199208 1 001

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Maksud dan Tujuan .....	1
C. Gambaran Umum Organisasi .....	2
1. Tugas Pokok dan Fungsi .....	2
2. Struktur Organisasi.....	4
D. Isu Strategis / Permasalahan.....	6
E. Landasan Hukum .....	7
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA .....</b>	<b>8</b>
A. Rencana Strategis .....	8
1. Visi.....	8
2. Misi.....	8
3. Tujuan .....	8
4. Sasaran Strategis .....	8
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2025 .....	9
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....</b>	<b>16</b>
A. Capaian Kinerja.....	16
1. Sasaran Strategis - 1 .....	16
1. Perbandingan antara target kinerja tahun ini (triwulan-1) .....	16
2. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja triwulan-1 dengan tahun sebelumnya .....	17
3. Perbandingan capaian kinerja triwulan-1 dengan target jangka menengah .....	17
4. Perbandingan dengan target nasional .....	18
5. Analisis penyebab keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja sasaran .....	18
6. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya .....	20
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran kinerja.....	21

2. Sasaran Strategis - 2 .....	32
1. Perbandingan antara target kinerja tahun ini (triwulan-1) .....	32
2. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja triwulan-1 dengan tahun sebelumnya .....	34
3. Perbandingan capaian kinerja triwulan-1 dengan target jangka menengah .....	34
4. Perbandingan dengan target nasional .....	35
5. Analisis penyebab keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja sasaran .....	35
6. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya .....	36
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran kinerja .....	38
3. Sasaran Strategis - 3 .....	45
1. Perbandingan antara target kinerja tahun ini (triwulan-1) .....	45
2. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja triwulan-1 dengan tahun sebelumnya .....	46
3. Perbandingan capaian kinerja triwulan-1 dengan target jangka menengah .....	46
4. Perbandingan dengan target nasional .....	47
5. Analisis penyebab keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja sasaran .....	47
6. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya .....	49
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran kinerja .....	50
B. Realisasi Anggaran .....	61
BAB IV PENUTUP .....	66
Lampiran - Lampiran	
Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Evaluasi Kinerja (LKj) Triwulan I Tahun 2025	

## BAB I PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka meningkatkan kinerja Perangkat Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan yang telah disepakati melalui Perjanjian Kinerja, maka perlu disusun Laporan Kinerja Intern Organisasi Perangkat Daerah yang kemudian laporan ini diharapkan Perangkat Daerah dapat mengontrol perkembangan dan kemajuan Perangkat Daerah dalam mengukur kinerja Perangkat Daerahnya.

Dasar Hukum Pelaksanaan Tugas Penyusunan Laporan ini mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Laporan ini menggambarkan diantaranya pengukuran kinerja Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur tahun 2025 pada Triwulan I yang meliputi sasaran strategis, indikator sasaran, target serta realisasi program dan realisasi anggaran. Dan untuk selanjutnya laporan ini dapat menjadi dasar dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) yang merupakan bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang wajib dibuat oleh penyelenggara negara termasuk Organisasi Pemerintah Daerah Perangkat Daerah. Penyelenggaraan SAKIP tertuang pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 meliputi Rencana Strategis, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pengelolaan Data Kinerja dan Pelaporan Kinerja serta Reviu dan Evaluasi Kinerja.

### B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Laporan Kinerja triwulan I Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 adalah sebagai penjabaran visi dan misi yang terwujud dalam tingkat keberhasilan /

kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Tujuan Penyusunan laporan kinerja triwulan I Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur adalah untuk memberikan kinerja yang terukur atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai serta sebagai upaya perbaikan yang berkesinambungan bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur untuk meningkatkan kinerjanya.

### C. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

#### 1. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 91 Tahun 2021 Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yaitu :

- a. Tugas pokok Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur adalah membantu Bupati dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.
- b. Fungsi, secara singkat fungsi dari Kesbangpol Kabupaten Luwu Timur, dapat diuraikan sebagai berikut :
  1. Perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa;
  2. Perumusan kebijakan teknis di Bidang Politik;
  3. Pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintah kabupaten;
  4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur, sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 91 Tahun 2021 tentang susunan organisasi, kedudukan, tugas dan fungsi serta tata kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Luwu Timur, maka struktur organisasi yang dibentuk terdiri dari :

1. Kepala Badan;
2. Sekertaris; membawahi
  - a. Sub bagian Perencanaan dan Keuangan
  - b. Sub bagian Umum dan Kepegawaian
3. Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
4. Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan

5. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik
6. Kelompok Jabatan Fungsional

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menerapkan core value berAKHLAK yang bertujuan untuk menyeragamkan nilai-nilai dasar bagi seluruh ASN sehingga dapat menjadi fondasi budaya kerja ASN yang professional, yang meliputi

1. Berorientasi Pelayanan

- a. Memberikan pelayanan rekomendasi izin kegiatan dan penertibatan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dengan cepat, mudah, dan ramah kepada masyarakat dan kelompok organisasi kemasyarakatan;
- b. Meningkatkan pelayanan dengan menyediakan aplikasi yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat

2. Akuntabel

- a. Menjamin bahwa setiap proses pelayanan yang dilakukan transparan sesuai dengan aturan yang berlaku;
- b. Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggungjawab, disiplin dan berintegritas tinggi, tidak menyalahgunakan tanggung jawab yang diberikan

3. Kompeten

- a. Meningkatkan kemampuan pengetahuan dan keterampilan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, seperti penggunaan teknologi digital dalam layanan rekomendasi izin kegiatan dan layanan organisasi kemasyarakatan

4. Harmonis

- a. Membangun lingkungan kerja yang kondusif, saling peduli dan menghargai perbedaan;
- b. Membangun hubungan yang baik dengan seluruh pemangku kepentingan

5. Loyal

- a. Berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara;
- b. Melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang diberikan sesuai dengan standar operasional prosedur yang telah ditetapkan

6. Adaptif

- a. Menerapkan inovasi digital yang mudah diakses untuk mempercepat proses pelayanan;

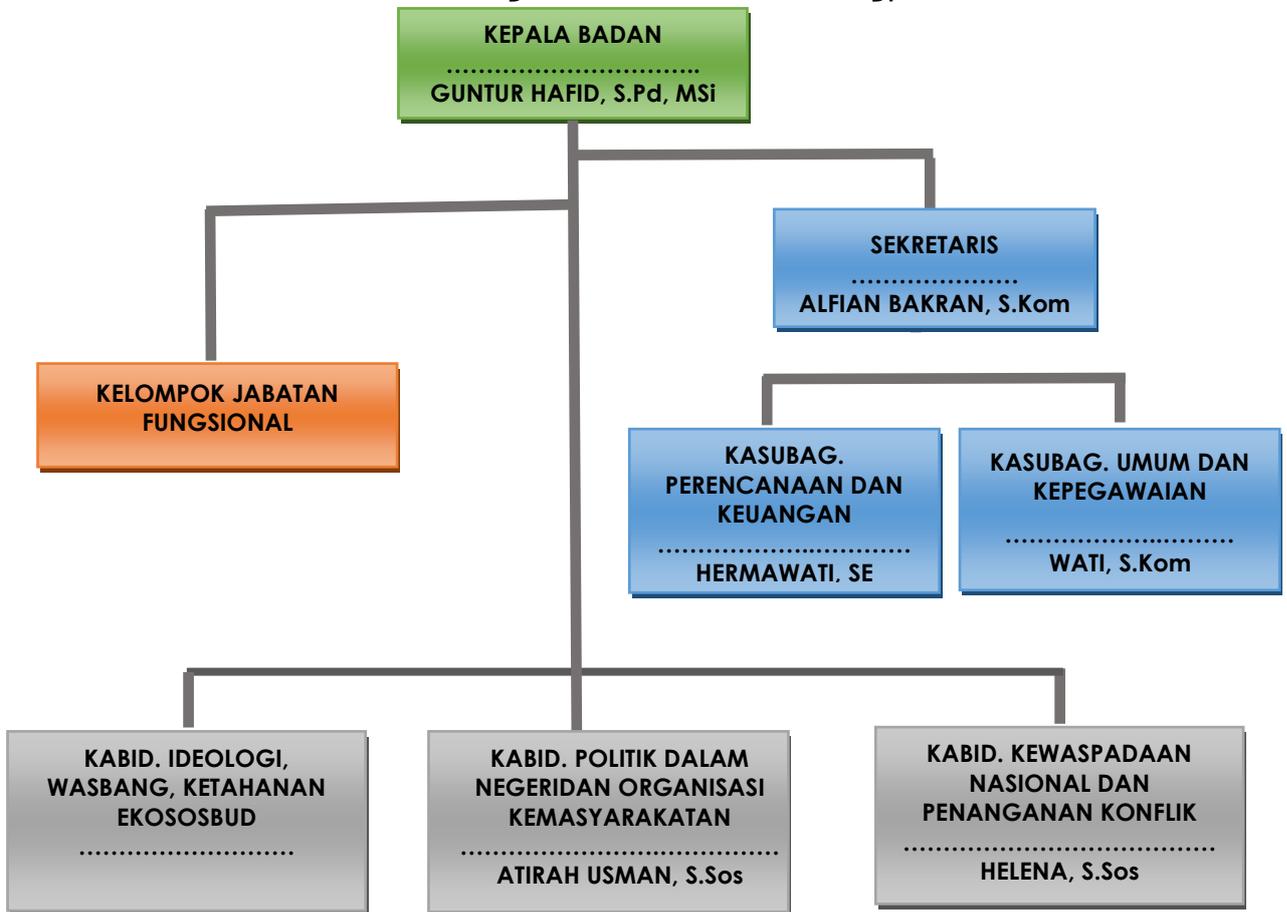
7. Kolaboratif

a. Bekerja sama dengan berbagai pihak dalam rangka menjaga stabilitas dan kondusifitas daerah serta memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat

2. Struktur Organisasi

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dipimpin oleh Kepala Badan, yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh sekretaris, kepala sub bagian dan para Kepala Bidang sebagaimana tergambar dalam struktur organisasi berikut

Gambar 1.1  
Struktur Organisasi Badan Kesbangpol



3. Sumber Daya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Untuk menjalankan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi yang ada di Kesbangpol Kabupaten Luwu Timur sangat ditentukan oleh sumber daya yang ada. Sumber daya di Kesbangpol Kabupaten Luwu Timur dapat berupa sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang ada.

Sumber daya manusia berupa tenaga teknis yang tetap di lingkup Kesbangpol Kabupaten Luwu Timur pada tahun 2024 dapat dilihat sebagai berikut:

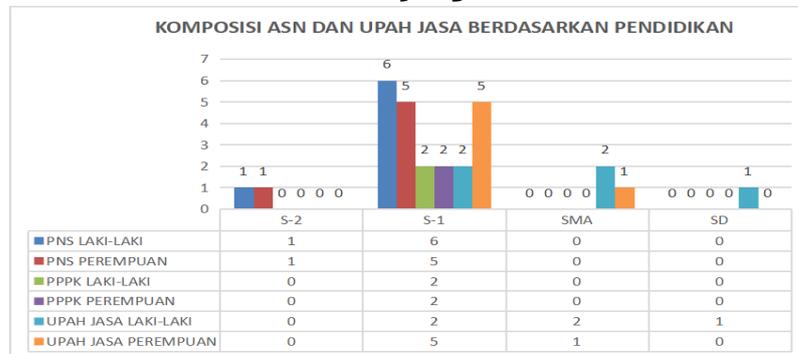
**Diagram 1.1**  
Komposisi SDM Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2025



Sumber : Sub Bag. Umum dan Kepegawaian Kesbangpol

Berdasarkan diagram diatas, dapat disimpulkan bahwa jumlah pegawai pada instansi Kesbangpol baik Aparatur Sipil Negara (PNS dan PPPK) maupun Upah Jasa berdasarkan jenis kelamin berjumlah 28 orang yaitu Laki-Laki sebanyak 15 orang (54%) dan Perempuan sebanyak 13 orang (46%).

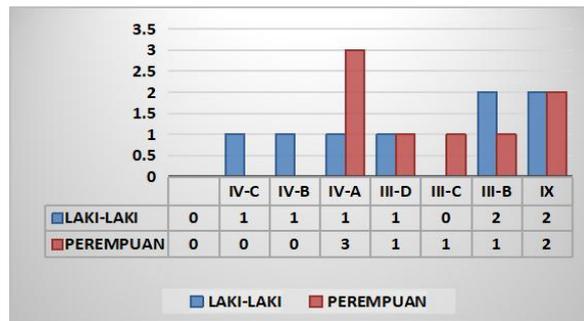
**Diagram 1.2**  
Komposisi SDM Berdasarkan Jenjang Pendidikan



Sumber : Sub Bag. Umum dan Kepegawaian Kesbangpol

Dari diagram di atas digambarkan bahwa jumlah Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Luwu Timur baik PNS, PPPK maupun Upah Jasa Triwulan I tahun 2025, berdasarkan jenjang Pendidikan meliputi : SD sebanyak 1 orang atau 3%, SMA sebanyak 3 orang atau 11%, S1 sebanyak 22 orang atau 79%, dan S2 sebanyak 2 orang atau 7%.

Diagram  
Komposisi pns Berdasarkan Golongan / Ruang



Sumber : Sub Bag. Umum dan Kepegawaian Kesbangpol

Berdasarkan diagram di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Aparatur Sipil Negara yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang terdapat pada Badan Kesbangpol berdasarkan golongan/ruang pada triwulan 1 tahun 2025 terdiri dari golongan IV/c sebanyak 1 orang (6%), golongan IV/b sebanyak 1 orang (6%), golongan IV/a sebanyak 4 orang (25%), golongan III/d sebanyak 2 orang (13%), golongan III/c sebanyak 1 orang (6%), golongan III/b sebanyak 3 orang (19%), dan golongan IX sebanyak 4 orang (25%).

#### D. ISU-ISU STRATEGIS / PERMASALAHAN

Berdasarkan evaluasi terhadap pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan teridentifikasi beberapa permasalahan atau kendala yang dihadapi, antara lain :

1. Terdapat kegiatan yang sifatnya disediakan, sehingga penggunaan anggaran disesuaikan dengan kondisi;
2. Realisasi anggaran gaji dan tunjangan lainnya yang masih rendah daya serapnya, dikarenakan SK yang mengatur pembayaran TPP belum diterbitkan;
3. Anggaran Hibah dana kepada penyelenggara Pemilu (KPU dan Bawaslu), TNI dan Polri yang belum direalisasikan dikarenakan administrasi yang belum lengkap;
4. Data dukung dari bidang yang belum maksimal;
5. Pengisian formulir evaluasi yang belum maksimal;
6. Keterlambatan PPTK dalam menyelesaikan SPJ sehingga berpengaruh terhadap capaian realisasi keuangan.

#### E. LANDASAN HUKUM

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015 - 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
5. Peraturan Presiden No 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/PAN/5/2007 tentang pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/PAN/5/2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan kinerja dan Review atas Laporan Kinerja;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

10. Peraturan Bupati Kabupaten Luwu Timur Nomor 91 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesbangpol.

## BAB II PERENCANAAN KINERJA

### A. RENCANA STRATEGIS

#### 1. Visi

**LUWU TIMUR YANG BERKELANJUTAN DAN LEBIH MAJU  
BERLANDASKAN NILAI AGAMA DAN BUDAYA**

Visi ini bermakna bahwa Kabupaten Luwu Timur adalah daerah yang terus berbenah menjadi lebih maju pada setiap langkah-langkah pelaksanaan pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan dan pembinaan kemasyarakatan dengan menerapkan nilai-nilai agama dan budaya didalamnya.

#### 2. Misi

Untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan, maka di perlukan misi. Kesbangpol Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 - 2026 melaksanakan misi ke-5 (M5) dan ke-6 (M6) yaitu

**MISI KE-5 : "MEWUJUDKAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN BAGI SELURUH WARGA MASYARAKAT"**  
**MISI KE-6 : "MENJAMIN KEBERLANGSUNGAN PEMBANGUNAN YANG BERBASIS PADA AGAMA DAN BUDAYA"**

#### 3. Tujuan

Tujuan adalah penjabaran dari misi yang merupakan hasil akhir yang harus dicapai dalam kurun waktu perencanaan sampai 5 (lima) tahun. Tujuan dari Kesbangpol Kabupaten Luwu Timur adalah : "Meningkatkan peran FKUB dalam membangun kerukunan beragama serta meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya". Dengan indikator tujuan yaitu Persentase peningkatan Peran FKUB dalam membangun Kerukunan beragama serta peningkatan masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya

#### 4. Sasaran Strategis

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata, dapat terukur dalam kurun waktu tertentu / tahunan, lebih pendek dari tujuan, dapat dicapai secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan. Untuk itu dalam sasaran perlu dirancang indikator sasaran yaitu ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan dalam kurun waktu tertentu disertai target masing-masing. Sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur sebagai berikut

SASARAN STRATEGIS
1. Terciptanya kerukunan umat beragama yang harmonis
2. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum
3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan keuangan OPD

#### B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Penyusunan Perjanjian Kinerja merupakan salah satu tahapan dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang termuat dalam Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Tujuan Penyusunan Perjanjian Kinerja adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja sebagai wujud nyata komitmen antara Kepala Organisasi Perangkat Daerah dengan Bupati, kepala OPD dengan sekretaris dan kepala bidang, dan seterusnya sampai kelevel jabatan pelaksana sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja dan sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi. Kesbangpol Kabupaten Luwu Timur telah menetapkan Perjanjian Kinerja tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel 2.1  
Perjanjian Kinerja Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terciptanya kerukunan umat beragama yang harmonis	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	80,47%
2.	Meningkatnya partisipasi	Tingkat partisipasi	

	masyarakat dalam pemilihan umum	politik masyarakat dalam Pemilu Nasional dan Lokal	82,39%
3.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan OPD	Nilai SAKIP	78,65

Tabel 2.2

**Perjanjian Kinerja Pejabat Eselon III dan IV  
Tahun 2025**

No	Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
<b>Sekretaris</b>			
I	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang memadai	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100%
1.	Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun tepat waktu	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi tepat waktu	100%
2.	Tersedianya laporan keuangan perangkat daerah	Persentase administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik	100%
3.	Terlaksananya administrasi dan penatausahaan barang milik daerah pada perangkat daerah	Persentase BMD yang diadministrasikan sesuai standar	100%
4.	Terlaksananya administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi kepegawaian perangkat daerah	100%
5.	Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah	Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi umum perangkat daerah	100%
6.	Terpenuhinya kebutuhan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase BMD perangkat daerah penunjang yang terpenuhi	100%
7.	Tersedianya jasa pendukung dan sarana penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase rata-rata capaian kinerja jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%
8.	Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah siap pakai	Persentase barang milik daerah penunjang pemerintahan yang terpelihara dengan baik	100%
<b>Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan</b>			
1.	Meningkatnya peran partai politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik	Persentase capaian peningkatan peran partai politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik	100%

No	Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.1	Terlaksananya pemantapan dan pelaksanaan bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik	Persentase capaian pelaksanaan bidang pendidikan politik, etika budaya politik, etika budaya politik dan peningkatan demokrasi dan fasilitasi kelembagaan pemerintahan serta pemantauan situasi politik daerah	100%
1.2.1	Tersusunnya program kerja dibidang Pendidikan politik, etika, budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik di daerah	Jumlah dokumen program kerja dibidang Pendidikan politik, etika, budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik di daerah yang disusun	1 Dokumen
1.2.2	Terlaksananya kebijakan di bidang Pendidikan politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, Pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik di daerah	Jumlah orang yang mengikuti pelaksanaan kebijakan di bidang Pendidikan politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, Pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik di daerah	52 Orang
1.2.3	Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang Pendidikan politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, Pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik di daerah	Jumlah laporan hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang Pendidikan politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, Pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik di daerah	4 Laporan
2.	Meningkatnya pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase jumlah ormas yang diberdayakan dan diawasi	100%

No	Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
2.1	Terlaksananya pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	Jumlah ormas yang diberdayakan dan diawasi	108 unit
2.2.1	Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di daerah	Jumlah laporan hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di daerah	4 laporan
<b>Bidang Ideologi, Wasbang dan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya</b>			
I.	Meningkatnya Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase jumlah kebijakan penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan yang dilaksanakan	100%
1.	Terlaksananya pemantapan dan pelaksanaan bidang ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	Persentase capaian pelaksanaan koordinasi dibidang ideologi wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa dan pembauran kebangsaan	100%
1.1.	Terlaksananya koordinasi di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan	Jumlah orang yang mengikuti koordinasi di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter kebangsaan, pembauran kebangsaan, bhineka Tunggal ika dan Sejarah kebangsaan	125 Orang
1.2	Terbentuknya pasukan pengibar bendera pusaka	Jumlah paskibraka	70 Orang
2.	Meningkatnya pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, social dan budaya	Persentase jumlah pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, social dan budaya	100%
2.1.	Terlaksananya pemantapan dan pelaksanaan bidang ketahanan ekonomi, social, dan budaya	Persentase capaian pelaksanaan pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, social dan budaya	100%
2.1.1.	Terlaksananya koordinasi dibidang ketahanan ekonomi, social budaya dan budaya serta fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika dan kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah	Jumlah orang yang mengikuti koordinasi di bidang ketahanan ekonomi, social, budaya dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah	542 Orang
<b>Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penangana Konflik</b>			
1.	Meningkatnya kewaspadaan nasional dan peningkatan	Persentase capaian peningkatan kewaspadaan nasional dan	100%

No	Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
	kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial	peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial	
1.1.	Terlaksananya pemantapan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial	Persentase capaian pelaksanaan pemantapan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial	100%
1.1.1.	Terlaksananya koordinasi di bidang kewaspadaan dini, kerjas ama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing, dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik didaerah	Jumlah orang yang mengikuti koordinasi di bidang kewaspadaan dini, kerjas ama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing, dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik didaerah	464 orang
1.1.2.	Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang kewaspadaan dini, kerjas ama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing, dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik didaerah	Jumlah laporan hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang kewaspadaan dini, kerjas ama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing, dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik didaerah	4 Laporan

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
Kasubag Perencanaan dan Keuangan			
1.	Tersusunnya dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	3 Dokumen
2.	Tersedianya dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan RKA-SKPD	2 Dokumen
3.	Terlaksananya evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	10 Laporan
4.	Tersediannya gaji dan tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	17 Orang/Bulan

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
5.	tersedianya laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	18 Laporan
<b>Kasubag Umum dan Kepegawaian</b>			
1.	Terlaksananya penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	4 laporan
2.	Terlaksananya pendataan dan pengelolaan administrasi kepegawaian	Jumlah dokumen pendataan dan pengelolaan administrasi kepegawaian	4 dokumen
3.	Terlaksananya bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	5 Orang
4.	tersedianya komponen instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah paket komponen instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	4 Paket
5.	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan	3 paket
6.	Tersedianya bahan logistik	Jumlah paket bahan logistic kantor yang disediakan	4 Paket
7.	Tersedianya barang cetak dan penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	4 Paket
8.	Tersediannya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	60 Dokumen
9.	Terlaksananya fasilitasi kunjungan tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	4 laporan
10.	Terlaksananya penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 laporan
11.	Tersedianya kendaraan dinas / operasional lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	1 Unit
12.	Tersediannya mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	38 Unit
13.	Tersedianya peralatan/mesin	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	2 Unit
14.	Tersedianya Gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah unit Gedung kantor dan bangunan lainnya yang disediakan	1 unit
15.	Terlaksananya penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	4 laporan

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
16.	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Listrik yang disediakan	4 Laporan
17.	Tersedianya jasa pelayanan umum kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	4 Laporan
18.	Tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	4 Unit
19.	Terlaksananya pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	27 Unit
20.	Terlaksananya pemeliharaan/rehabilitasi Gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Unit
21.	Terlaksananya pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Unit

**BAB III**  
**AKUNTABILITAS KINERJA**

**A. Capaian Kinerja**

Pengukuran capaian kinerja triwulan I ini merupakan pengukuran dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sesuai dengan penetapan kinerja yang telah disepakati bersama, dalam hal ini antara Kepala OPD dengan Bupati. Pengukuran kinerja disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.1

**Pengukuran Capaian Kinerja**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2025
1.	Terciptanya kerukunan umat beragama yang harmonis	Indeks Kerukunan Umat Beragama	80,47%
2.	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum	Tingkat Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilu Nasional dan Lokal	82,39%
3.	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja dan Keuangan OPD	Nilai SAKIP	78,65

**Sasaran 1**

“ Terciptanya kerukunan umat beragama yang harmonis “

- **Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis**
  1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun Ini (Triwulan I)

Tabel 3.2.

**Capaian Indikator Sasaran I**

INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2025	TARGET TRIWULAN I	REALISASI TRIWULAN I	PERSENTASE CAPAIAN
Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	80,47%	-	-	-

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa target dan realisasi kinerja Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) triwulan I belum ditargetkan, dikarenakan kegiatan pengukuran indeks kerukunan umat beragama dilaksanakan diakhir tahun 2025 atau pada triwulan 3 tahun 2025.

2. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Triwulan 1 dengan Tahun Lalu

Tabel 3.

Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan 1 dengan Tahun Sebelumnya

SASARAN – 1 : TERCIPTANYA KERUKUNAN UMAT BERAGAMA YANG HARMONIS				
INDIKATOR KINERJA SASARAN “INDEKS KERUKUNAN UMAT BERAGAMA (IKUB)”	Triwulan I Tahun 2024		Triwulan I Tahun 2025	
	TARGET (%)	REALISASI (%)	TARGET (%)	REALISASI (%)
	-	-	-	-

Dari tabel diatas, dapat dijelaskan bahwa target dan realisasi indeks kerukunan umat beragama tahun 2024 dan tahun 2025 pada triwulan 1 belum ditargetkan, dikarenakan kegiatan pengukuran indeks kerukunan umat beragama dilaksanakan diakhir tahun berjalan.

3. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan 1 Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah

Pada triwulan 1 tahun 2025 sasaran “terciptanya kerukunan umat beragama yang harmonis” dengan indikator kinerja “indeks kerukunan umat beragama (IKUB)” belum ditargetkan sehingga tidak dapat dibandingkan dengan target jangka menengah. Namun jika mengacu pada realisasi Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) tahun 2024 yaitu 80,47% maka target jangka menengah yaitu 76,85% telah dilampaui,

Tabel 3.

## Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan 1 Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah

SASARAN I : TERCIPTANYA KERUKUNAN UMAT BERAGAMA YANG HARMONIS					
INDIKATOR KINERJA SASARAN : "INDEKS KERUKUNAN UMAT BERAGAMA (IKUB)	TARGET TAHUN 2025 (%)	TARGET TW-1 TAHUN 2025	REALISASI TW-1 TAHUN 2025	REALISASI TAHUN 2024	TARGET AKHIR RENSTRA 2026 (%)
	80,47%	-	-	80,47%	76,85%

## 4. Perbandingan dengan Target Nasional

Salah satu cara untuk mengetahui tingkat keberhasilan kinerja yang telah capai adalah dengan membandingkan realisasi kinerja yang telah dicapai dengan standar nasional atau realisasi kinerja daerah/instansi lain.

Untuk perbandingan realisasi triwulan 1 dengan target nasional atau daerah lain, belum bisa dilakukan perbandingan dikarenakan untuk target dan realisasi kinerja indeks kerukunan umat beragama triwulan I Tahun 2025 belum ada, sehingga tidak dapat dilakukan perbandingan.

Berdasarkan data realisasi Indeks Kerukunan Umat Beragama Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 yaitu 79,04%. Jika dibandingkan dengan nilai Indeks Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 yaitu 80,47%, maka nilai IKUB Kabupaten Luwu Timur melampaui dari nilai IKUB Propinsi Sulawesi Selatan. Dengan selisih realisasi nilai IKUB yaitu 1,43%..

## 5. Analisis Penyebab Keberhasilan dan Kegagalan Pencapaian Kinerja Sasaran

Beberapa Penyebab keberhasilan dalam pencapaian indicator Terciptanya Kerukunan Umat Beragama yang Harmonis jika mengacu pada pencapaian tahun sebelumnya dan untuk pencapaian kinerja tahun 2025 yaitu :

- a. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik bersama dengan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Luwu Timur

- terus melakukan sosialisasi aturan-aturan dan moderasi beragama di masyarakat;
- b. Adanya koordinasi dan komunikasi yang intensif dengan instansi terkait untuk mensosialisasikan program-program yang berkaitan dengan kerukunan dan moderasi beragama;
  - c. Terjalannya koordinasi dan konsolidasi dengan tokoh-tokoh masyarakat (alim ulama, tokoh agama, tokoh adat) dalam melakukan deteksi dini dan pencegahan serta menjaga kerukunan antar umat beragama dimasyarakat

Namun, dalam pencapaian kinerja ini masih terdapat beberapa kendala atau hambatan diantaranya :

- a. Pengetahuan masyarakat tentang regulasi yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama masih kurang;
- b. Heterogenya masyarakat Kabupaten Luwu Timur, sehingga rawan terjadi gesekan sosial, yang tentunya dapat berdampak pada tingkat kerukunan dimasyarakat;
- c. Terbatasnya sumber daya manusia pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur untuk melakukan tugas deteksi dini dan koordinasi dengan pihak-pihak terkait.

Untuk mengantisipasi permasalahan di atas, ada beberapa solusi/alternative yang telah dilakukan oleh Badan Kesbangpol Kabupaten Luwu Timur diantaranya :

- a. Meningkatkan jalinan kerjasama dengan pihak-pihak terkait dan penguatan Forum Kerukunan Umat Beragama dalam pencapaian sasaran perangkat daerah untuk menjaga kerukunan dan menekan gesekan-gesekan sosial serta potensi konflik yang mungkin terjadi;
- b. Memanfaatkan anggaran yang tersedia secara efektif dan efisien untuk melaksanakan kegiatan pemantauan, sosialisasi, rapat koordinasi, serta pemberdayaan forum-forum strategis yang sudah terbentuk di daerah;
- c. Mengintensifkan koordinasi dan kerjasama dengan instansi-instansi terkait.

## 6. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dengan keterbatasan sumber daya yang ada pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, baik sumber daya sarana, prasarana maupun tenaga dalam menunjang pencapaian kinerja terhadap sasaran “Terciptanya Kerukunan Umat Beragama yang Harmonis” maka dapat difasilitasi dengan meningkatkan koordinasi yang intensif dengan forum–forum strategis yang telah terbentuk, memaksimalkan fungsi Tim Informan yang ada pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur untuk melakukan deteksi dini dan cegah dini terhadap potensi konflik yang terjadi di Kabupaten Luwu Timur. Melakukan koordinasi lintas sectoral dan memasang papan himbuan untuk tetap menjaga kerukunan dan kedamaian dimasyarakat.

Tabel 3.  
Pencapaian Kinerja dan Anggaran

Sasaran Strategis	Program/	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
			Target TW. I	Realisasi Tw. I	Capaian	Anggaran Tw. I	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Terciptanya Kerukunan Umat Beragama yang Harmonis		Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	-	-	-	453,978,700	45,602,016	10,04%
	1. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase jumlah kebijakan penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan yang dilaksanakan	100%	100%	100%	71,919,000	32,421,516	45,08%
	2. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase jumlah pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, social dan budaya	100%	0%	0%	85,143,500	3,040,000	3,57%

Sasaran Strategis	Program/	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
			Target TW. I	Realisasi TW. I	Capaian	Anggaran TW. I	Realisasi	Capaian
	3. Program Peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitas penanganan konflik sosial	Persentase capaian peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial	100%	100%	100%	296,916,200	10,140,500	3,42%

Adapun persentase efisiensi biaya dapat dihitung dengan menggunakan formulasi :

$$\text{Persentase Efisiensi biaya} = \frac{\text{Realisasi Biaya}}{\text{Target Biaya}} \times 100\%$$

Tabel 3.

## Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sasaran	Indikator	% Realisasi Kinerja	% Realisasi Anggaran	% Tingkat efisiensi Anggaran
Terciptanya Kerukunan Umat Beragama yang Harmonis	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	-	10,04%	89,95%

Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa efisiensi anggaran terhadap pencapaian kinerja indicator “*Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)*” adalah 89,95%

#### 7. Analisis Progam/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Kinerja Sasaran

##### 1. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan

Penguatan ideologi Pancasila dan Karakter kebangsaan adalah suatu pandangan hidup atau sistem nilai dasar yang menjadi landasan bagi negara dan menjadi tatanan yang

mendasari kebudayaan masyarakat serta mencerminkan kepribadian masyarakat itu sendiri.

Tujuan *Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan* adalah untuk menumbuhkan rasa nasionalisme dan semangat kecintaan terhadap tanah air.

Sasaran program adalah meningkatnya penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan. Indikator program yaitu Persentase jumlah kebijakan penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan yang dilaksanakan. Target kinerja 100% terealisasi 100% dengan capaian kinerja 100%

Formula indikatornya adalah sebagai berikut :

Jumlah Kebijakan Penguatan Ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan yang dilaksanakan dibagi Jumlah Kebijakan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan yang diamanahkan x 100%.  
 = 1 Kebijakan / 1 Kebijakan X 100%  
 = 80%

Adapun capaian program tersebut berasal dari kebijakan-kebijakan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan yang diamanahkan dan dilaksanakan pada triwulan 1 yaitu Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Pasukan Pengibar Bendera Pusaka

Kebijakan ini telah di implementasikan dalam kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh bidang ideologi, wawasan kebangsaan dan ketahanan ekonomi, social dan budaya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur.

Program ini didukung oleh 1 (satu) kegiatan dan 2 (dua) sub kegiatan, sebagai berikut :

1.1. Kegiatan : Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat Kabupaten Luwu Timur terhadap Ideologi Pancasila, Karakter Kebangsaan, Wawasan Kebangsaan dan Kesadaran Bela Negara.

Dengan indikator kinerja yaitu “Persentase capaian pelaksanaan koordinasi dibidang ideologi wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa dan pembauran kebangsaan.

Adapun formulasi yang digunakan adalah

Jumlah kegiatan penyelenggaraan penguatan ideologi Pancasila dan Nilai-Nilai Wasbang yang dilaksanakan dibagi jumlah kegiatan penyelenggaraan penguatan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan yang direncanakan X 100%

$$= 3 \text{ kegiatan} / 3 \text{ kegiatan} \times 100\%$$

$$= 100\%$$

Pada triwulan 1 terealisasi sesuai dengan target dengan capaian kinerja 100%. Adapun kegiatan yang direncanakan dan dilaksanakan yaitu kegiatan ke PASKIBRAKAAN yang meliputi kegiatan sosialisasi aplikasi paskibraka; kegiatan seleksi administrasi; dan kegiatan seleksi akademik.

Dokumentasi kegiatan Tahapan Seleksi Paskibraka



Dokumentasi : Rapat Selesksi Administrasi Paskibraka 2025



Dokumentasi : Sosialisasi Pendaftaran Calon Paskibraka 2025 di Sekolah-Sekolah



Dokumentasi : Seleksi Akademik (TIU dan TWK) Ca-Paskib 2025

1.1.1. Sub kegiatan : Pelaksanaan koordinasi di bidang ideologi, wawasan kebangsaan. Karakter kebangsaan, bela negara, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan.

Sasaran kinerja sub kegiatan ini adalah terlaksananya koordinasi di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan. Dengan indikator kinerja Jumlah orang yang mengikuti koordinasi di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter kebangsaan, pembauran kebangsaan, bhineka Tunggal ika dan Sejarah kebangsaan Target Kinerja Tahun 2025 sebanyak 125 orang. Pada Triwulan 1 kegiatan ini belum ditargetkan;

Sub kegiatan diukur dengan menggunakan formula :

Jumlah Peserta Koordinasi (Tw-n)

Table  
Capaian Kinerja

No	Uraian	Triwulan 1
1.	Target	-
2.	Realisasi	-
3.	Capaian	-

1.1.2. Sub kegiatan : Pembentukan Paskibraka

Sasaran kinerja sub kegiatan ini adalah terbentuknya pasukan pengibar bendera pusaka. Dengan indikator kinerja yaitu jumlah paskibraka (orang).

Target Kinerja Tahun 2025 sebanyak 70 orang PASKIBRAKA.

Pada triwulan 1 belum ditargetkan namun proses seleksi PASKIBRAKA Tahun 2025 telah dimulai yaitu sosialisasi; seleksi administrasi dan seleksi akademik.

Sub kegiatan diukur dengan menggunakan formula :

Jumlah paskibraka (Tw-n)

Table  
Capaian Kinerja

No	Uraian	Triwulan 1
1.	Target	-
2.	Realisasi	-
3.	Capaian	-

## 2. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya

Sasaran kinerja program yaitu meningkatnya pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, social dan budaya. Dengan indikator persentase jumlah pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, social dan budaya. Pada triwulan 1 tidak terealisasi dikarenakan fasilitasi kerukunan umat beragama yang belum terlaksana.

Formula indikatornya adalah sebagai berikut :

$$\begin{aligned} & \text{Jumlah Pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, social dan} \\ & \text{budaya yang dilaksanakan DIBAGI Jumlah Pembinaan dan pengembangan} \\ & \text{ketahanan ekonomi, social dan budaya yang direncanakan (tw-n)} \\ & \times 100\% \\ & = 0 / 1 \times 100\% \\ & = 0\% \end{aligned}$$

Program ini didukung oleh 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan, sebagai berikut

### 2.1. Kegiatan : Perumusan kebijakan teknis dan pementapan pelaksanaan bidang ketahanan ekonomi, social dan budaya

Indicator kegiatan yaitu Persentase capaian pelaksanaan pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, social dan budaya. Pada Triwulan 1 tidak terealisasi dikarenakan kegiatan Rapat Kerja dengan FKUB yang direncanakan, belum dilaksanakan, sebab padatnya agenda lintas instansi dan mitra kerja, termasuk FKUB, yang menyebabkan tidak tercapainya kesepakatan waktu pelaksanaan hingga akhir triwulan 1.

Adapun formulasi kegiatan yaitu :

$$\begin{aligned} & \text{jumlah kegiatan pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi,} \\ & \text{social dan budaya yang dilaksanakan DIBAGI jumlah kegiatan} \\ & \text{pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, social dan budaya} \\ & \text{yang direncanakan (Tw-n) X 100\%} \\ & = 0 \text{ Kegiatan} / 1 \text{ Kegiatan} \times 100\% \\ & = 0\% \end{aligned}$$

2.1.1. Sub kegiatan : Pelaksanaan koordinasi di bidang ketahanan ekonomi, social, budaya dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah

Indicator sub kegiatan ini adalah jumlah orang yang mengikuti koordinasi di bidang ketahanan ekonomi, social, budaya dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah.

Pada Triwulan 1 ditargetkan 47 orang yang mengikuti koordinasi di bidang ketahanan ekonomi, social, budaya dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah. Namun tidak terealisasi atau capaian kinerja 0%. hal ini dikarenakan padatnya agenda lintas instansi dan mitra kerja, termasuk FKUB, yang menyebabkan tidak tercapainya kesepakatan waktu pelaksanaan hingga akhir triwulan 1 sehingga rapat kerja yang diagendakan tidak terlaksana.

Sub kegiatan ini diukur dengan menggunakan formula :

Jumlah Peserta koordinasi (Tw-n)

Table  
Capaian Kinerja

No	Uraian	Triwulan 1
1.	Target	41 orang
2.	Realisasi	0 Orang
3.	Capaian	0%

### 3. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial

Indikator kinerja program adalah Persentase capaian peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial. Capaian kinerja pada triwulan 1 sebesar 100% dengan jumlah kejadian dan konflik yang tertangani dan terjadi sebanyak 18 kasus.

Pencapaian indikator program ini diukur dengan menggunakan formula sebagai berikut :

$$\begin{aligned} & \text{Jumlah kejadian dan konflik yang ditangani} \div \text{jumlah} \\ & \text{kejadian dan konflik yang terdata} \times 100\% \\ & = 18 \text{ Kasus} / 18 \text{ Kasus} \times 100\% \\ & = 100\% \end{aligned}$$

Berikut data kejadian dan konflik yang terdata dan tertangani pada periode bulan januari sampai dengan maret 2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.

#### Data Kejadian dan Konflik Periode Januari – Maret 2025

No	Jenis Kejadian	Tanggal	Desa	Kecamatan	Uraian Kejadian	Kerugian			Tidak lanjut/ Solusi
						Material	Korban Jiwa	Korban Luka	
1	Unjuk Rasa (Demo)	07 Januari 2025	Puncak Indah	Malili	Aksi unjuk rasa oleh Fron Pemuda Asosiasi Perusahaan Tokoh Lokal terkait evaluasi terhadap gerai Alfamart, Indomart dan Alfamidi	-	-	-	Telah dimediasi oleh DPRD dan Pemerintah Daerah dan diterima segala tuntutan pengunjuk rasa
2	Pencurian	08 Januari 2025	Mantadulu	Angkona	Pencurian buah sawit diwilayah perkebunan PT.PN IV oleh pelaku Nursan	-	-	-	Pelaku sudah diamankan oleh Pihak PT.PN
3	Ledakan Kompor	11 Januari 2025	Magani	Nuha	Ledakan kompor portable di pantai C Salonsa	-	-	5 Orang	Korban sudah dibawa ke Rumah Sakit
4	Kebakaran Rumah	14 Januari 2025	Langkea Raya	Towuti	Kecelakaan rumah warga atas nama Andi Parawisi di Desa Langkea Raya Kecamatan Towuti	1 unit rumah	-	-	Telah dipadamkan oleh Personel Damkar dibantu masyarakat

No	Jenis Kejadian	Tanggal	Desa	Kecamatan	Uraian Kejadian	Kerugian			Tidak lanjut/ Solusi
						Material	Korban Jiwa	Korban Luka	
5	Tanah Longsor	16 Januari 2025	Kasintuwu	Mangkutana	Bencana tanah longsor di Desa Kasintuwu	-	-	-	Sudah dilaporkan kepada Pemerintah daerah
6	Penemuan Mayat	18 Januari 2025	Kalpataru	Tomoni	Penemuan mayat (Rizal) di sungai Tomoni	-	1 Orang	-	Jenasah sudah dievakuasi dan diserahkan kepada keluarga untuk di makamkan
7	Aksi Unjuk Rasa (Demo)	21 Januari 2025	Puncak Indah	Malili	Aksi unjuk rasa oleh Pemuda Masyarakat dan Asosiasi UMKM terkait pembangunan gerai minimarket yang tidak sesuai aturan	-	-	-	Telah dilakukan mediasi oleh Pemerintah daerah
8	Penemuan Mayat	22 Januari 2025	Kasintuwu	Mangkutana	Penemuan mayat (Arianto Tahir) di Desa Kasintuwu Kecamatan Mangkutana	-	1 Orang	-	Telah dilakukan evakuasi dan jenasah diserahkan pada pihak keluarga
9	Aksi Unjuk Rasa (Demo)	23 Januari 2025	Ledu-ledu	Wasuponda	Aksi unjuk rasa oleh Forum komunikasi masyarakat wasuponda terkait tuntutan air bersih	-	-	-	telah dilakukan mediasi oleh Pemerintah Kecamatan dan Polsek
10	Bencana Alam	07 Februari 2025	Sindu Agung	Mangkutana	Bencana alam banjir di Desa Sindu Agung	10 juta	-	-	Telah dilaporkan pada BPBD
11	Bencana Alam	07 Februari 2025	Mabonta	Burau	Bencana alam banjir dan anging kencang di Desa Mabonta	1 unit rumah	-	-	Telah dilaporkan pada BPBD
12	Bencana Alam	07 Februari 2025	kalatiri	Burau	Benacana alam banjir dan angin kencang di Desa Kalatiri	1 unit rumah	-	-	Telah dilaporkan pada BPBD
13	Aksi Unjuk Rasa (Demo)	12 Februari 2025	Puncak Indah	Malili	Aksi unjuk rasa oleh Forum pemuda dan asosiasi pengusaha tokoh lokal	-	-	-	Telah dilakukan mediasi oleh Pemerintah daerah
14	Bencana Alam	13 Februari 2025	Wewangriu	Malili	Bencana alam angin putting beliung di Desa Wewangriu	17 unit rumah	-	-	Telah dilaporkan pada BPBD
15	Kebakaran Rumah	17 Februari 2025	Lampenai	Wotu	Kebakaran rumah (Andi) di kampung Alau Desa Lampenai	1 unit rumah	-	-	Telah dilaporkan pada BPBD
16	Aksi Unjuk Rasa (Demo)	20 Februari 2025	Puncak Indah	Malili	Aksi unjuk rasa oleh Tenaga honorer yang dirumahkan	-	-	-	Telah dilakukan mediasi oleh Pemerintah daerah
17	Aksi Unjuk Rasa (Demo)	11 Maret 2025	Ussu	Malili	Aksi unjuk rasa oleh Aliansi Rakyat Miskin Lingkar Tambang terhadap PT.PUL terkait penghentian aktivitas PT.PUL	-	-	2 Orang	Telah dilakukan mediasi oleh Polres dan Pemerintah Daerah

No	Jenis Kejadian	Tanggal	Desa	Kecamatan	Uraian Kejadian	Kerugian			Tidak Lanjut/ Solusi
						Material	Korban Jiwa	Korban Luka	
18	Bencana Alam	19 Maret 2025	Kasintuwu	Mangkutana	Bencana alam tanah longsor akibat curah hujan yang tinggi	-	-	-	Sudah dilaporkan kepada Pemerintah Desa dan Polsek

**3.1. Kegiatan : Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial**

Indikator kegiatan yaitu Persentase capaian pelaksanaan pemantapan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik social. Pada triwulan 1 terealisasi 100% sesuai dengan target yang ditetapkan dengan capaian kinerja 100%. Adapun kegiatan yang direncanakan dan telah dilaksanakan pada triwulan 1 yaitu kegiatan pemantauan situasi stabilitas daerah; dan Koordinasi dan pemantauan kegiatan FORKOPIMDA.

Adapun formulasi kegiatan sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 & \text{Jumlah kegiatan pemantapan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik} \\
 & \text{social yang dilaksanakan (Tw-n) DIBAGI Jumlah kegiatan pemantapan} \\
 & \text{kewaspadaan nasional dan penanganan konflik social yang direncanakan} \\
 & \text{(Tw-n) X 100\%} \\
 & = 2 \text{ Kegiatan X 2 Kegiatan X 100\%} \\
 & = 100\%
 \end{aligned}$$

Dokumentasi Kegiatan



Dokumentasi : Koordinasi dan Pemantauan Kegiatan FORKOPIMDA



Dokumentasi : Kegiatan Pemantauan Stabilitas Daerah

3.1.1. Sub Kegiatan : Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah

Sasaran sub kegiatan yaitu terlaksananya koordinasi di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing, dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik didaerah. Dengan indicator kinerja Jumlah orang yang mengikuti koordinasi di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing, dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik didaerah. Pada Tahun 2025 ditargetkan 464 orang

pada triwulan 1 berdasarkan rencana aksi sub kegiatan ini belum ditargetkan.

Sub kegiatan diukur dengan menggunakan formula :

Jumlah Peserta koordinasi (Tw-n)

Table  
Capaian Kinerja

No	Uraian	Triwulan 1
1.	Target	0 Orang
2.	Realisasi	0 Orang
3.	Capaian	0%

3.1.2. Sub Kegiatan : Pelaksanaan Monitoring, evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah

Sasaran sub kegiatan ini adalah terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing, dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik didaerah. Dengan indicator kinerja Jumlah laporan hasil

monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing, dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di daerah.

Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan pemantauan, pengawasan terhadap ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan (ATHG) terhadap stabilitas daerah dan nasional. Target kinerja Tahun 2025 yaitu 4 laporan hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang kewaspadaan dini serta penanganan konflik di daerah. Pada Triwulan 1 ditargetkan 1 laporan, terealisasi 1 laporan dengan capaian kinerja 100%

Sub kegiatan diukur dengan menggunakan formula :

Jumlah laporan hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang kewaspadaan dini serta penanganan konflik di daerah (Tw-n)

Table  
Capaian Kinerja

No	Uraian	Triwulan 1
1.	Target	1 Laporan
2.	Realisasi	1 Laporan
3.	Capaian	100%

### 3.1.3. Sub Kegiatan : Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten / Kota

Sasaran sub kegiatan ini adalah terlaksananya forum koordinasi pimpinan daerah kabupaten / kota. Dengan indicator jumlah dokumen hasil pelaksanaan forum koordinasi pimpinan daerah kabupaten/kota. Pada Triwulan 1 ditargetkan 1 laporan, terealisasi 1 laporan dengan capaian kinerja 100%.

Sub kegiatan diukur dengan menggunakan formula :

Jumlah dokumen hasil pelaksanaan FORKOPIMDA Kabupaten/Kota (Tw-n)

Table  
Capaian Kinerja

No	Uraian	Triwulan 1
1.	Target	1 Laporan
2.	Realisasi	1 Laporan
3.	Capaian	100%

## Sasaran 2

### “ Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum “

Sasaran strategis Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Politik Masyarakat dengan indicator sasaran yaitu tingkat partisipasi politik masyarakat dalam Pemilu Nasional dan Local. Peran serta atau partisipasi masyarakat dalam politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk turut serta secara aktif dalam kehidupan politik, dengan jalan memilih pimpinan negara atau daerah, yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah (*public policy*).

Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu), menunjukkan semakin kuatnya tatanan demokrasi dalam sebuah negara. Dalam berdemokrasi, keterlibatan rakyat dalam setiap penyelenggaraan yang dilakukan negara adalah sebuah keniscayaan (keharusan yang tidak bisa tidak). Rakyat menjadi factor yang sangat penting dalam tatanan demokrasi, karena demokrasi mendasarkan pada logika persamaan dan gagasan bahwa pemerintah memerlukan persetujuan dari yang diperintah. Untuk itu, penyelenggaraan pemilu nasional dan local sebagai sarana dalam melaksanakan demokrasi, tentu saja tidak boleh dilepaskan dari adanya keterlibatan masyarakat.

#### ❖ Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis

##### 1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun Ini (Triwulan I)

Untuk mengukur keberhasilan sasaran strategis “Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilu Umum” ditetapkan 1 (satu) indicator kinerja yaitu Tingkat Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilu Nasional dan Lokal”. Realisasi dan capaian dapat dilihat pada table berikut :Tabel 3.

Capaian Indikator Sasaran II

INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2025	TARGET Tw-1	REALISASI Tw-1	CAPAIAN
Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum Nasional dan Lokal	82,39%	82,39%	82,39%	100%

Sumber : Bidang Politik Dalam Negeri Badan Kesbangpol

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa realisasi kinerja triwulan I sebesar 82,39% dengan capaian kinerja 100%. Realisasi merupakan data numerik KPU Kabupaten Luwu Timur berdasarkan penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak (Pilpres dan Pileg) Bulan Februari Tahun 2024.

Pencapaian positif indikator sasaran Tingkat Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilu Nasional dan Lokal tersebut diperoleh dari formulasi :

$$\begin{aligned} & \text{Jumlah Suara dibagi Jumlah Daftar Pemilih Tetap} \times 100\% \\ & = 179,883 \text{ suara} / 218,322 \text{ DPT} \times 100\% \\ & = 82,39\% \end{aligned}$$

Data partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.  
Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu Serentak  
(PILEG dan PILPRES) Tahun 2024

NO	KECAMATAN	DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)	SUARA SAH	SUARA TIDAK SAH	TOTAL (SUARA SAH + SUARA TIDAK SAH)	PERSENTASE (%)
1	Burau	25.316	20.478	240	20.718	81.84
2	Wotu	24.116	19.953	333	20.286	84.12
3	Tomoni	19.318	15.941	306	16.247	84.10
4	Tom-Tim	10.217	8.404	92	8.496	83.16
5	Mangkutana	16.392	12.930	164	13.094	79.88
6	Kalaena	9.125	7.385	78	7.463	81.79
7	Angkona	18.244	14.919	311	15.230	83.48
8	Malili	30.587	24.910	366	25.276	82.64
9	Wasuponda	15.793	12.453	102	12.555	79.50
10	Towuti	31.968	26.879	313	27.192	85.06
11	Nuha	17.246	13.237	89	13.326	77.27
Total		218.322	177.489	2.394	179.883	82,39

Sumber : Bid. Politik Dalam Negeri Badan Kesbangpol dan KPU Kab. Luwu Timur

## 2. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Triwulan 1 dengan Tahun Lalu

Tabel 3.  
Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan 1 dengan Tahun Sebelumnya

No	Sasaran	Indikator	Target		Realisasi	
			Tw.I 2024	TW.I 2025	Tw.I 2024	TW.I 2025
1.	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum	Tingkat partisipasi politik masyarakat dalam pemilu nasional dan local	81%	82,39%	82,39%	82,39%

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa pencapaian realisasi kinerja sasaran strategis meningkatnya partisipasi Masyarakat dalam pemilihan umum dengan indicator kinerja Tingkat partisipasi politik masyarakat dalam pemilu nasional dan local triwulan 1 tahun 2024 melampaui target yang ditetapkan, sedangkan realisasi triwulan 1 tahun 2025 mencapai target yang ditetapkan hal ini dikarenakan data realisasi yang digunakan pada tahun 2025 menggunakan data numerik KPU Kabupaten Luwu Timur pada penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2024.

## 3. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan 1 Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah

Pada Renstra Badan Kesbangpol Kabupaten Luwu Timur tahun 2021-2026 tingkat partisipasi politik masyarakat dalam pemilu nasional dan local sampai dengan akhir RPJMD ditargetkan 81,00%. Jika dibandingkan dengan realisasi TW.1 Tahun 2025 yaitu 82,39%, telah melampaui dari target jangka menengah yang ditetapkan.

Adapun perbandingan antara target dan capaian triwulan I dengan target dan jangka menengah pada Renstra Badan Kesbangpol Kabupaten Luwu Timur 2021 - 2026 sebagai berikut :

Tabel 3.

Perbandinagn Capaian Kinerja Triwulan 1 Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah

Sasaran 2:	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum
Indikator	Tingkat Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilu Nasional dan Lokal
Target 2025	82,39%
Realisasi Tw.I	82,39%
Capaian Sampai dengan Triwulan I Tahun 2025	100%
Target Akhir Renstra (2026)	81,00%

#### 4. Perbandingan dengan Target Nasional

Salah satu cara untuk mengetahui tingkat keberhasilan kinerja yang telah capai adalah dengan membandingkan realisasi kinerja yang telah dicapai dengan standar nasional atau realisasi kinerja daerah/instansi lain.

Secara nasional target kinerja untuk capaian tingkat partisipasi politik masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya, khususnya dalam pemilihan umum serentak (PILEG dan PILPRES) adalah 79,50%. Berdasarkan data numerik dari KPU Kabupaten Luwu Timur capaian partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya melampaui dari target nasional yang ditetapkan yaitu 82,39%.

#### 5. Analisis Penyebab Keberhasilan dan Kegagalan Pencapaian Kinerja Sasaran

Beberapa Penyebab keberhasilan dalam pencapaian indicator tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilu Nasional dan Lokal yaitu :

- a. Menjalin koordinasi dan kolaborasi dengan instansi terkait maupun partai politik dalam melaksanakan Pendidikan politik dimasyarakat;
- b. Memaksimalkan penggunaan sarana dan prasarana yang dimiliki;
- c. Memaksimalkan jumlah personil yang ada dalam pembagian wilayah pemantauan dan pelaksanaan kegiatan

Namun, dalam pencapaian kinerja ini masih terdapat beberapa kendala atau hambatan diantaranya :

- a. Masih kurangnya pemahaman masyarakat akan pentingnya Pendidikan politik;
- b. Minimnya dukungan anggaran untuk melaksanakan kegiatan Pembinaan Ormas, LSM dan OKP serta kegiatan Pendidikan politik kepada masyarakat;
- c. Terbatasnya sumber daya manusia pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur untuk melakukan tugas pemantauan situasi politik dimasyarakat

Untuk mengantisipasi permasalahan di atas, ada beberapa solusi/alternative yang telah dilakukan oleh Badan Kesbangpol Kabupaten Luwu Timur diantaranya :

- a. Meningkatkan jalinan koordinasi dan kerjasama dengan pihak-pihak terkait dalam pencapaian sasaran meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya;
- b. Melakukan sosialisasi yang masif, terkait Pendidikan politik dimasyarakat;
- c. Memanfaatkan anggaran yang tersedia secara efektif dan efisien untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang telah diprogramkan

#### 6. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dengan keterbatasan sumber daya yang ada pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, baik sumber daya sarana, prasarana maupun tenaga dalam menunjang pencapaian kinerja terhadap sasaran “Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum” maka dapat difasilitasi dengan meningkatkan koordinasi yang intensif dengan dengan instansi terkait dan partai-partai politik untuk melakukan sosialisasi dan Pendidikan politik dimasyarakat.

Tabel 3.  
Pencapaian Kinerja dan Anggaran

Sasaran Strategis	Program/	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
			Target Tw. I	Realisasi Tw. I	Capaian	Anggaran I Tw.	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum		Tingkat Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilu Nasional dan Lokal	82,39%	82,39%	100%	83,878,000	16,815,000	20,04%
	1. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	Persentase capaian peningkatan peran partai politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik	-	-	0%	64,695,000	11,905,000	18,40%
	2. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase jumlah ormas yang diberdayakan dan diawasi	25%	28%	111%	19,183,000	4,910,000	25,60%

Adapun persentase efisiensi biaya dapat dihitung dengan menggunakan formulasi :

$$\text{Persentase Efisiensi biaya} = \frac{\text{Realisasi Biaya}}{\text{Target Biaya}} \times 100\%$$

Tabel 3.  
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sasaran	Indikator	% Realisasi Kinerja	% Realisasi Anggaran	% Tingkat efisiensi Anggaran
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum	Tingkat Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilu Nasional dan Lokal	100%	20,04%	79,96%

Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa efisiensi anggaran terhadap pencapaian kinerja indicator "Tingkat

*partisipasi politik masyarakat dalam Pemilu Nasional dan Lokal ” adalah 79,26%*

7. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Kinerja Sasaran

1. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik

Sasaran kinerja program yaitu Meningkatnya peran partai politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik. Indikator program yaitu Persentase capaian peningkatan peran partai politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik. Pada triwulan 1 capaian kinerja program ini belum ditargetkan.

Formula indikatornya adalah sebagai berikut :

Jumlah Partai Politik yg memenuhi syarat pengajuan Bantuan Keuangan Partai Politik DIBAGI Jumlah Partai Politik yang menerima bantuan Keuangan Partai Politik X 100%

Program ini didukung oleh 1 (satu) kegiatan dan 3 (tiga) sub kegiatan, sebagai berikut:

1.1. Kegiatan : Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatnya pemahaman masyarakat Kabupaten Luwu Timur akan pentingnya pendidikan politik dimasyarakat.

Dengan indicator kinerja yaitu Persentase capaian pelaksanaan bidang pendidikan politik, etika budaya politik, etika budaya politik dan peningkatan demokrasi dan fasilitasi kelembagaan pemerintahan serta

pemantauan situasi politik daerah. Ditargetkan 100% dan terealisasi 100% atau capaian kinerja 100%. Adapun yang menjadi target kinerja ditriwulan 1 yaitu terlaksananya pemantauan situasi politik daerah

Adapun formulasi yang digunakan adalah

$$\begin{aligned} &\text{Rata-rata capaian kinerja Sub Kegiatan dibidang Pendidikan} \\ &\text{politik etika budaya politik, serta pemantauan situasi} \\ &\text{politik daerah (Tw-n) x 100\%} \\ &= 100\% / 100\% \\ &= 100\% \end{aligned}$$

1.1.1. Sub kegiatan : Penyusunan program kerja dibidang Pendidikan politik etika, budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik

Sasaran kinerja sub kegiatan yaitu tersusunnya program kerja dibidang Pendidikan politik, etika, budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik di daerah. Target Kinerja sub kegiatan untuk Tahun 2025 hanya 1 dokumen yang disusun tepat waktu. Untuk Triwulan 1 belum ditargetkan. Adapun formulasi yang digunakan untuk mengukur capaian kinerja adalah :

$$\begin{aligned} &\text{Jumlah dokumen program kerja dibidang Pendidikan politik,} \\ &\text{etika, budaya politik, serta pemantauan situasi politik di} \\ &\text{daerah yang disusun tepat waktu (Tw-n)} \end{aligned}$$

Table  
Capaian Kinerja

No	Uraian	Triwulan 1
1.	Target	0 Laporan
2.	Realisasi	0 Laporan
3.	Capaian	100%

1.1.2. Sub kegiatan : Pelaksanaan kebijakan dibidang Pendidikan politik etika, budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik

Sasaran sub kegiatan yaitu terlaksananya kebijakan di bidang Pendidikan politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, Pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik di daerah. Target kinerja sub kegiatan hanya pada triwulan 2 yaitu sebanyak 52 orang peserta yang mengikuti rapat evaluasi dan monitoring bantuan keuangan partai politik kepada pengurus partai politik. Adapun formulasi yang digunakan untuk mengukur capaian kinerja adalah :

Jumlah peserta yang mengikuti pelaksanaan kebijakan di bidang Pendidikan politik (Tw-n)

Table  
Capaian Kinerja

No	Uraian	Triwulan 1
1.	Target	0 Orang
2.	Realisasi	0 Orang
3.	Capaian	0%

1.1.3. Sub kegiatan : Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan dibidang Pendidikan politik etika, budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik

Sasaran sub kegiatan yaitu terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang Pendidikan politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, Pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik di daerah. Target yang ditetapkan pada triwulan 1 adalah 1 (satu) laporan dan terealisasi 1 Laporan hasil monitoring, evaluasi

dan pelaporan di bidang Pendidikan politik dengan capaian kinerja 100%.Sub kegiatan ini diukur dengan menggunakan formula :

Jumlah laporan hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang Pendidikan politik serta pemantauan situasi politik di daerah yang disusun tepat waktu (Tw-n)

Table  
Capaian Kinerja

No	Uraian	Triwulan 1
1.	Target	1 Laporan
2.	Realisasi	1 Laporan
3.	Capaian	100%

Kegiatan ini adalah melakukan pemantauan situasi politik di wilayah Kabupaten Luwu Timur untuk mengetahui perkembangan politik dan menciptakan stabilitas politik pemerintahan di daerah. Dalam hal ini pelaksanaan evaluasi perkembangan politik di daerah dilakukan dengan berkoordinasi dengan pihak kecamatan dan pemantauan secara langsung di lapangan terhadap isu-isu atau kerawanan politik yang mengarah pada persaingan tidak sehat dan menimbulkan perselisihan. Berikut data pemantauan situasi politik di daerah

Tabel 3.  
Data Pemantauan Situasi Politik di Daerah

No	Kecamatan	Penjelasan
1.	Nuha	Perkembangan situasi politik dalam keadaan aman dan kondusif
2.	Towuti	Perkembangan situasi politik dalam keadaan aman dan kondusif
3.	Wasuponda	Perkembangan situasi politik dalam keadaan aman dan kondusif
4.	Malili	Perkembangan situasi politik dalam keadaan aman dan kondusif
5.	Angkona	Perkembangan situasi politik dalam keadaan aman dan kondusif
6.	Kalaena	Perkembangan situasi politik dalam keadaan aman dan kondusif
7.	Mangkutana	Perkembangan situasi politik dalam keadaan aman dan kondusif
8.	Tomoni	Perkembangan situasi politik dalam keadaan aman dan kondusif
9.	Tomoni Timur	Perkembangan situasi politik dalam keadaan aman dan kondusif
10.	Wotu	Perkembangan situasi politik dalam keadaan aman dan kondusif
11.	Burau	Perkembangan situasi politik dalam keadaan aman dan kondusif

*Sumber Data : Bidang Politik Dalam Negeri*

## 2. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat

Sasaran program yaitu meningkatnya pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat. Dengan indikator kinerja program yaitu Persentase jumlah ormas yang diberdayakan dan diawasi. Untuk Tahun 2025 ditargetkan 25% atau sebanyak 27 kelompok dari 108 Kelompok ditahun 2025. Adapun realisasi yaitu 28% atau sebanyak 30 kelompok dengan capaian kinerja 111%. Melampaui dari target yang ditetapkan dikarenakan banyaknya kelompok ormas/LSM/Kelompok Tani dan Nelayan/Rumah Ibadah/Lembaga Pendidikan yang mengajukan permohonan bantuan pada OPD terkait untuk mendapatkan bantuan hibah barang dan hibah dana yang mempersyaratkan adanya SKT (Surat Keterangan Terdaftar) dari Badan Kesbangpol.

Formulasi untuk mengukur capaian kinerja program ini adalah sebagai berikut :

$$\begin{aligned} & \text{Jumlah Ormas yang diberdayakan dan diawasi DIBAGI jumlah ormas yang} \\ & \text{ditargetkan (n) X 100\%} \\ & = 30 \text{ Kelompok} / 108 \text{ Kelompok} \times 100\% \\ & = 28\% \end{aligned}$$

Program ini didukung oleh 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan sebagai berikut :

### 2.1. Kegiatan : Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat

Sasaran kegiatan yaitu terlaksananya Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat. Adapun target ormas yang diawasi dan diberdayakan pada triwulan I yaitu sebanyak 27 kelompok, terealisasi 30 kelompok dan Nelayan/Rumah Ibadah/Lembaga Pendidikan atau capaian 111%.

Adapun formulasi kegiatan yaitu :

$$\begin{aligned} & \text{Jumlah ormas yang diberdayakan dan diawasi (Tw-n)} \\ & = 30 \text{ Kelompok} \end{aligned}$$

Tabel 3.

## Data Ormas/Kelompok Tani/Kelompok Nelayan/Rumah Ibadah

No	Nama Organisasi	Alamat
1	MASJID BAITUL MAKMUR	Desa Kanawatu Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur
2	MASJID AL-AZHAR DARUL HASANI	Desa Beringin Jaya Kecamatan Tomoni Kabupaten Luwu Timur
3	Masjid Al-Anshor Tarabbi	Desa Tarabbi Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur
4	Masjid Darul Mukhlashin	Desa Ussu Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur
5	Gereja Toraja Jemaat Lauwo Baru	Desa Lauwo Baru Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur
6	GEREJA KRISTEN SULAWESI TENGAH (GKST) JEMAAT BUKIT ZAITUN MABUNGKA	Desa Kasintuwu Kecamatan Mangkutana Kabupaten Luwu Timur
7	GEREJA KRISTEN SULAWESI TENGAH (GKST) JEMAAT	Desa Matompi Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur
8	Gereja Katolik Santo Thomas	Desa Mantadulu Kecamatan Angkona Kabupaten Luwu Timur
9	Gereja Katolik Stasi Santo Fransiskus Asisi	Desa Non Blok Kecamatan Kalaena Kabupaten Luwu Timur
10	Gereja Bethel Indonesia Jemaat Pakatan	Desa Maleku Kecamatan Mangkutana Kabupaten Luwu Timur
11	KELOMPOK TANI PEMBUDIDAYA IKAN SINAR KATONIK	Desa Tampinna Kecamatan Angkona Kabupaten Luwu Timur
12	KELOMPOK PEMBUDIDAYA IKAN (POKDAKAN) MAWAR KUNING	Dusun Susue Jaya Desa Lakawali Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur
13	KELOMPOK PEMBUDIDAYA IKAN MATARAM SUKSES	Desa Lera Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur
14	KELOMPOK PEMBUDIDAYA IKAN REJEKI ABADI	Desa Lera Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur
15	KELOMPOK PEMBUDIDAYA IKAN SUMBER REJEKI	Desa Lera Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur
16	KELOMPOK PAGUYUBAN BIRAMA AUDIO MUSIK	Desa Lakawali Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur
17	KELOMPOK TANI BUDIDAYA UDANG & IKAN BANDENG SIKAMASEI	Desa Lakawali Pantai Kec. Malili Kab. Luwu Timur
18	KELOMPOK TANI BUDIDAYA RUMPUT LAUT BERINGIN KATONIK	Desa Bawalipu Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur
19	Kelompok Tani Budidaya Rumput Laut Beringin Brokoli	Desa Bawalipu Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur
20	KELOMPOK NELAYAN TANGKAP SALEKOE	Desa Lampenai Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur
21	KELOMPOK TANI BUDIDAYA IKAN MUSEDI	Desa Balo-Balo Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur
22	KELOMPOK NELAYAN TANGKAP BOROLI	Desa Lampenai Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur
23	KELOMPOK USAHA BERSAMA BERINGIN LAUT	Desa Balatang Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur

No	Nama Organisasi	Alamat
24	KELOMPOK USAHA BERSAMA SEJAHTERA	Desa Balatang Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur
25	KELOMPOK NELAYAN TANGKAP WATU MALANGNGA	Desa Lampenai Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur
26	Kelompok Pengelolaan Ikan Bandeng Dapur Astri	Desa Tabaroge Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur
27	Kelompok Tani Budidaya Ikan Delon	Desa Bawalipu Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur
28	YAYASAN AT-TIBYAN ISLAMIC SCHOOL	Dusun Waemami Desa Atue Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur
29	PETEWAWO GAU TO KARUNSIE	Desa Ledu-Ledu Kecamatan Wasuponda Kabupaten Luwu Timur
30	GERAKAN TERDEPAN LUWU TIMUR (GARDA LUTIM)	Jl. Andi Nyiwi RT.001 Lingkungan Malili Kelurahan Malili Kec. Malili Kab. Luwu Timur

Dokumentasi Kegiatan Verifikasi Ormas/LSM/Klp Tani/Rumah Ibadah



2.1.1. Sub Kegiatan : Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di daerah

Sasaran Sub kegiatan yaitu terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di daerah. Pada triwulan 1 ditargetkan 1 laporan dan terealisasi 1 laporan hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, dan evaluasi. Dengan capaian kinerja 100%.

Formula mengukur capaian kinerja adalah sebagai berikut :

Jumlah laporan hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas yang disusun tepat waktu (Tw-n)

Table  
Capaian Kinerja

No	Uraian	Triwulan 1
1.	Target	1 Laporan
2.	Realisasi	1 Laporan
3.	Capaian	100%

### Sasaran 3

“ Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan “

#### ➤ Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Sasaran strategis meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan keuangan OPD merupakan tahapan yang dilakukan untuk mewujudkan reformasi birokrasi di setiap organisasi pemerintah dan bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja pelayanan SPKD adalah dalam rangka pencapaian tujuan terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik. Tata kelola pemerintahan yang baik mengandung prinsip efektif dan efisien terhadap pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Untuk mengukur keberhasilan sasaran strategis meningkatnya akuntabilitas pelayanan SKPD ini ditetapkan indikator kinerja nilai evaluasi akuntabilitas kinerja.

#### 1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun Ini (Triwulan 1)

Tabel 3.

Capaian Indikator Sasaran III

INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2025	TARGET TRIWULAN I	REALISASI TRIWULAN I	PERSENTASE CAPAIAN
Nilai Sakip	78,65	0	0	0

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa indicator nilai SAKIP, target triwulan 1 belum ditargetkan,

dikarenakan untuk capaian indicator ini berdasarkan hasil evaluasi SAKIP oleh Inspektorat Kabupaten Luwu Timur tahun (n-1).

2. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun Ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Selanjutnya, perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3  
Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Kinerja  
Tahun 2019–2024

INDIKATOR	SATUAN	TAHUN	TARGET	REALISASI	KATEGORI	CAPAIAN KINERJA
Nilai Sakip	Nilai	2019	70	70,9	BB	101,28
		2020	70	62,18	B	86,8
		2021	72	66,76	B	92,72
		2022	67	70,23	BB	104,82
		2023	69	77,95	BB	112,97
		2024	77,95	78,65	BB	100,90
		2025	78,65	Belum ada	-	-

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah

Mengacu pada realisasi tahun 2024 yaitu 78,65 , jika dibandingkan dengan target jangka menengah sampai tahun 2026, telah melampau dari target jangka menengah. Adapun perbandingan antara target dan capaian tahun 2025 dengan target dan kinerja jangka menengah pada Renstra Badan Kesbangpol Kabupaten Luwu Timur 2021 – 2026 sebagai berikut

Tabel 3.

Perbandinagn Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Target  
Jangka Menengah

Sasaran III:	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan
Indikator	Nilai SAKIP
Realisasi 2024	78,65
Target Akhir Renstra 2026	72
Capaian Sampai dengan Tahun 2025	Belum Rilis

## 4. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional atau Daerah Lain

Salah satu cara untuk mengetahui tingkat keberhasilan kinerja yang telah capai adalah dengan membandingkan realisasi kinerja yang telah dicapai dengan realisasi kinerja daerah/instansi lain. Perbandingan antara tingkat capaian Badan Kesbangpol Kabupaten Luwu Timur dengan daerah lain dalam pencapaian Indikator Strategis, jika mengacu pada realisasi ditahun 2024, dimana Kesbangpol Kota Banjar mendapatkan nilai 71.5 dengan Predikat B, sementara Badan Kesbangpol Kabupaten Luwu Timur memperoleh nilai 78,65 dengan Predikat BB. Nilai SAKIP antara Kesbangpol Kabupaten Luwu Timur dan Kesbangpol Kota Banjar terdapat selisih nilai sebesar 7.15, Namun Kesbangpol Kabupaten Luwu Timur masih harus semakin meningkatkan kinerja sehingga dapat meningkatkan nilai SAKIP-nya dimasa yang akan datang.

## 5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Dilakukan

Secara keseluruhan dari tahun ke tahun capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur terhadap sasaran strategis Meningkatkan Akuntabilitas

Kinerja Pelayanan SKPD menunjukkan predikat baik, hal ini disebabkan beberapa factor :

1. Badan Kesbangpol telah memiliki Renstra sebagai dokumen perencanaan jangka menengah periode 2021–2026 yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, program, dan target jangka menengah;
2. Telah disusun RKT, Perjanjian dan Rencana Aksi dan telah selaras dengan Renstra;
3. Pemberdayaan SDM / Aparatur yang cukup maksimal sehingga mendukung kelancaran operasional kantor.

Namun, dalam pencapaian kinerja ini masih terdapat beberapa kendala atau hambatan diantaranya :

1. Kurangnya SDM/Aparatur yang kompeten dibidangnya;
2. Kurangnya sarana dan prasarana penunjang operasional.
3. Belum optimalnya penyusunan perjanjian kinerja sampai ke tingkat staf/pelaksana
4. Monitoring dan evaluasi atas perjanjian kinerja yang belum berjalan dengan baik

Untuk mengantisipasi permasalahan di atas, ada beberapa solusi/alternative yang telah dilakukan oleh Badan Kesbangpol Kabupaten Luwu Timur diantaranya:

1. Menyelaraskan semua dokumen perencanaan sampai tingkat bawah dan menyusun rencana aksi pencapaian kinerja seperti perjanjian kinerja sampai jenjang staf dan menyusun indikator kinerja;
2. Melakukan monitoring dan evaluasi setiap bulan atau triwulan atas perjanjian kinerja yang telah ditetapkan dengan rapat internal. Dengan adanya rapat ini maka dapat dilakukan pencegahan atas faktor penghambat pencapaian kinerja serta memberikan penghargaan dan hukuman atas kinerja yang telah dicapainya;
3. Meningkatkan komitmen semua pejabat dan aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Luwu Timur dalam melaksanakan semua bagian akuntabilitas kinerja

- seperti: perencanaan, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja;
4. Mengikuti sosialisasi, bimbingan teknis dan asistensi penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
  6. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
    - Analisis efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan dengan memaksimalkan tugas-tugas pokok dan fungsi disetiap bidang dan pada level kasubag. Begitupun dengan keterbatasan sumber daya manusia yang ada khususnya staf-staf atau jabatan pelaksana pada setiap bidang dengan memaksimalkan tenaga upah jasa dalam membantu pelaksanaan tugas-tugas ASN.
    - Memaksimalkan peralatan dan perlengkapan kantor yang ada dengan melakukan pemeliharaan peralatan kantor untuk mendukung pelaksanaan tugas ASN

Tabel 3.

## Pencapaian Kinerja dan Anggaran

Sasaran Strategis	Program	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
			Target Tw. I	Realisasi Tw. I	Capaian	Anggaran Tw. I	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan		Nilai Sakip	Tidak ditargetkan	-	-	975,194,581	557,020,580	57,12%
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kab/kota	100%	81,25%	81,25%	975,194,581	557,020,580	57,12%

Adapun persentase efisiensi biaya dapat dihitung dengan menggunakan formulasi :

$$\text{Persentase Efisiensi biaya} = \frac{\text{Realisasi Biaya}}{\text{Target Biaya}} \times 100\%$$

Tabel 3.  
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Program	Indikator	% Realisasi Kinerja Tw-1	% Realisasi Anggaran Tw-1	% Tingkat efisiensi Anggaran
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kab/kota	81,25%	57,12%	42,88%

Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa efisiensi anggaran terhadap pencapaian kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota yang merupakan program penunjang/pendukung dari pencapaian Sasaran *Strategis Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan OPD* adalah 42,88%

#### 7. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Kinerja Sasaran

Adapun program, kegiatan dan sub kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian kinerja sasaran “meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan pada triwulan 1 terdiri dari 1 (satu) program, 8 (delapan) Kegiatan dan 26 (dua puluh Enam) sub kegiatan, sebagai berikut :

##### 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten / Kota

Sasaran program yaitu meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang memadai. Indikator program adalah Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota.

Target yang ditetapkan untuk program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota pada triwulan I Tahun 2025 adalah yaitu 100% terealisasi sebesar 100% dengan capaian kinerja 100%. Capaian kinerja tidak mencapai target yang ditetapkan dikarenakan ada beberapa sub kegiatan yang tidak terealisasi sesuai target yang ditetapkan.

Formulasi mengukur capaian program :

$$\begin{aligned} & \text{Jumlah capaian kinerja kegiatan DIBAGI jumlah seluruh kegiatan} \times \\ & 100\% \text{ (Tw-n)} \\ & = (100\%+100\%+100\%+50\%+100\%+0\%+100\%+100\%) / 8 \text{ Kegiatan} \times 100\% \\ & = 100\% \end{aligned}$$

Program ini didukung 8 kegiatan dan 26 sub kegiatan sebagai berikut :

Tabel 3.  
Capaian Kinerja Kegiatan dan Sub Kegiatan

No	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Formula	Target Tahunan	Target / Realisasi / Capaian												Keterangan		
					Target				Realisasi				Capaian						
					Tw-1	Tw-2	Tw-3	Tw-4	Tw-1	Tw-2	Tw-3	Tw-4	Tw-1	Tw-2	Tw-3	Tw-4			
1.	Kegiatan Perencanaan , Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	persentase penyusunan dokumen perencanaan , penganggaran dan evaluasi tepat waktu	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi yang disusun tepat waktu dibagi Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi yang direncanakan X 100%	100%	100					100					100				Tersusun dokumen perencanaan yaitu : 1.Tw.1 ditargetkan 4 dokumen (LAKIP,LKPJ, RRPD Tw.4 thn 2024, LKJIP Tw.4 Thn 2024
1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun tepat waktu	2 Dok	-					-					-				1.Tw.1 : Sub Kegiatan belum ditargetkan
1.2	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD yang disusun	Jumlah dokumen RKA- SKPD yang disusun tepat waktu	2 Dok	-					-					-				1.Tw.1 : Sub Kegiatan belum ditargetkan
1.3	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD yang disusun	Jumlah dokumen DPA- SKPD yang disusun tepat waktu	2 Dok	-					-					-				1.Tw.1 : Sub Kegiatan belum ditargetkan
1.4	Sub	Jumlah	Jumlah																1.Tw.1 : target

No	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Formula	Target Tahunan	Target / Realisasi / Capaian												Keterangan		
					Target				Realisasi				Capaian						
					Tw-1	Tw-2	Tw-3	Tw-4	Tw-1	Tw-2	Tw-3	Tw-4	Tw-1	Tw-2	Tw-3	Tw-4			
	Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	laporan evaluasi kinerja yang disusun	laporan evaluasi kinerja yang disusun tepat waktu	10 Laporan	4 Lap					4 Lap					100%				dan realisasi sebanyak 4 laporan (LAKIP, LKPJ, RKP, DIBAGI) Tw.4 Thn 2024, LKJIP Thn 2024
2.	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik	Jumlah dokumen laporan keuangan yang diterbitkan DIBAGI Jumlah dokumen laporan keuangan yang disusun X 100%	100%	100%					100%					100%				Tersusunnya laporan keuangan bulanan, triwulan dan semesteran serta laporan keuangan tahunan 1. Tw.1 :1 Lap. CALK 2024, 3 Lap. Bulanan (jan, feb, mar), 1 lap. Penutupan kas
2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	17 Org/Bln	17 Org/Bln					17 Org/Bln					100%				Terbayarkan gaji dan tunjangan kepada 17 Orang ASN setiap bulan
2.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD yang	18 Laporan	5 Lap					5 Lap					100%				1. Tw.1 :1 Lap. CALK 2024, 3 Lap. Bulanan (jan, feb, mar), 1 lap. Penutupan kas

No	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Formula	Target Tahunan	Target / Realisasi / Capaian												Keterangan
					Target				Realisasi				Capaian				
					Tw-1	Tw-2	Tw-3	Tw-4	Tw-1	Tw-2	Tw-3	Tw-4	Tw-1	Tw-2	Tw-3	Tw-4	
		yang disusun	disusun tepat waktu														
3.	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah	Persentase BMD yang diadministrasikan sesuai standar	Jumlah dokumen laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD yang disusun dibagi Jumlah dokumen laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD X 100%	100%	100%				100%				100%				Tersusun dokumen administrasi barang milik daerah
3.1	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD yang disusun	Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD yang disusun tepat waktu	4 Laporan	1 Lap				1 Lap				100%				1. Tw.1 : Terealisasi sesuai dengan target (1 laporan)
4.	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi kepegawaian perangkat daerah	Jumlah capaian kinerja seluruh sub kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah DIBAGI jumlah seluruh sub kegiatan administrasi umum	100%	50%				50%				50%				1. Pada Tw-1 target kinerja tidak tercapai karena adanya Sub Kegiatan yang capaiannya hanya 50% yaitu (BIMTEK)

No	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Formula	Target Tahunan	Target / Realisasi / Capaian												Keterangan							
					Target				Realisasi				Capaian											
					Tw-1	Tw-2	Tw-3	Tw-4	Tw-1	Tw-2	Tw-3	Tw-4	Tw-1	Tw-2	Tw-3	Tw-4								
			perangkat daerah X 100%																					
4.1	Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	jumlah dokumen pendataan dan pengelolaan administrasi kepegawaian yang disusun	jumlah dokumen pendataan dan pengelolaan administrasi kepegawaian yang disusun tepat waktu	4 Dokuman	1 Dok					1 Dok							100%							1. Pada Tw-1, terealisasi sesuai dengan target (1 dok)
4.2	Bimbingan Teknis dan Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	5 Orang	2 Org					0 Org								0%						1. Pada Tw-1, Sub kegiatan ini tidak terealisasi, dikarenakan kegiatan ini sifatnya disediakn ada persuratan
5.	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi kepegawaian perangkat daerah	Jumlah capaian kinerja seluruh sub kegiatan pada kegiatan administrasi umum perangkat daerah DIBAGI jumlah seluruh sub	100%	100%					100%								100%						1. Pada Tw-1, terealisasi sesuai target yang ditetapkan

No	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Formula	Target Tahunan	Target / Realisasi / Capaian												Keterangan
					Target				Realisasi				Capaian				
					Tw-1	Tw-2	Tw-3	Tw-4	Tw-1	Tw-2	Tw-3	Tw-4	Tw-1	Tw-2	Tw-3	Tw-4	
			kegiatan pada kegiatan administrasi umum perangkat daerah x 100%														
5.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	jumlah paket komponen instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	jumlah paket komponen instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	4 Paket	4 Paket				4 Paket				100%				1. Pada Tw-1, terealisasi sesuai target
5.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan	8 Paket	0 Paket				0 Paket				0%				1. Pada Tw-1, Sub kegiatan ini belum ditargetkan
5.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistic kantor yang disediakan	Jumlah paket bahan logistic kantor yang disediakan	4 Paket	4 paket				4 paket				100%				1. Pada Tw-1, terealisasi sesuai target
5.4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	4 Paket	4 Paket				4 Paket				100%				1. Pada Tw-1, terealisasi sesuai target
5.5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan	60 Dokumen	15 Dok				15 Dok				100%				1. Pada Tw-1, terealisasi sesuai target

No	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Formula	Target Tahunan	Target / Realisasi / Capaian												Keterangan
					Target				Realisasi				Capaian				
					Tw-1	Tw-2	Tw-3	Tw-4	Tw-1	Tw-2	Tw-3	Tw-4	Tw-1	Tw-2	Tw-3	Tw-4	
	Perundang-Undangan	peraturan perundang-undangan yang disediakan	perundang-undangan yang disediakan														
5.6	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	4 Laporan	4 laporan				4 laporan				100%				1. Pada Tw-1, terealisasi sesuai target
5.7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 Laporan	3 Lap				3 Lap				100%				1. Pada Tw-1, terealisasi sesuai target
6.	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase BMD perangkat daerah penunjang yang terpenuhi	Jumlah capaian kinerja seluruh sub kegiatan pada kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah administrasi umum perangkat daerah dibagi jumlah seluruh sub kegiatan pada kegiatan Pengadaan	100%	0%				0%				0%				1. Pada Tw-1, Tidak terealisasi sesuai target, dikarenakan belum ada pejabat pengadaan yang ditunjuk. Pada Tw-1 direncanakan pengadaan 2 unit AC pada Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

No	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Formula	Target Tahunan	Target / Realisasi / Capaian												Keterangan
					Target				Realisasi				Capaian				
					Tw-1	Tw-2	Tw-3	Tw-4	Tw-1	Tw-2	Tw-3	Tw-4	Tw-1	Tw-2	Tw-3	Tw-4	
			Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah administrasi umum perangkat daerah x 100%														
6.1	Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional Lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	1 Unit	0 Unit				0 unit				0%				1.Pada Tw-1, Sub Kegiatan belum ditargetkan
6.2	Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	Jumlah paket mebel yang disediakan	38 Unit	0 unit				0 unit				0%				1.Pada Tw-1, Sub Kegiatan belum ditargetkan
6.3	Pengadaan Peralatan dan Mesin	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	2 Unit	2 unit				0 unit				0%				1.Pada Tw-1, Tidak terealisasi pengadaan 2 unit AC dikarenakan belum ada Pejabat Pengadaan yang ditunjuk
6.4	Pengadaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah unit Gedung kantor/bangunan lainnya yang disediakan	Jumlah unit Gedung kantor dan bangunan lainnya yang disediakan	1 Unit	0 unit				0 unit				0%				1.Pada Tw-1, Sub Kegiatan Belum ditargetkan

No	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Formula	Target Tahunan	Target / Realisasi / Capaian												Keterangan
					Target				Realisasi				Capaian				
					Tw-1	Tw-2	Tw-3	Tw-4	Tw-1	Tw-2	Tw-3	Tw-4	Tw-1	Tw-2	Tw-3	Tw-4	
7.	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase rata-rata capaian kinerja jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah capaian kinerja seluruh sub kegiatan pada kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah dibagi jumlah seluruh sub kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah X 100%	100%	100%				100%				100%				1. Pada Tw-1, terealisasi sesuai target yang ditetapkan
7.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	4 Laporan	1 lap				1 lap				100%				1. Pada Tw-1, terealisasi sesuai target (1 Laporan)
7.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	4 Laporan	1 lap				1 lap				100%				1. Pada Tw-1, terealisasi sesuai target (1 Laporan)

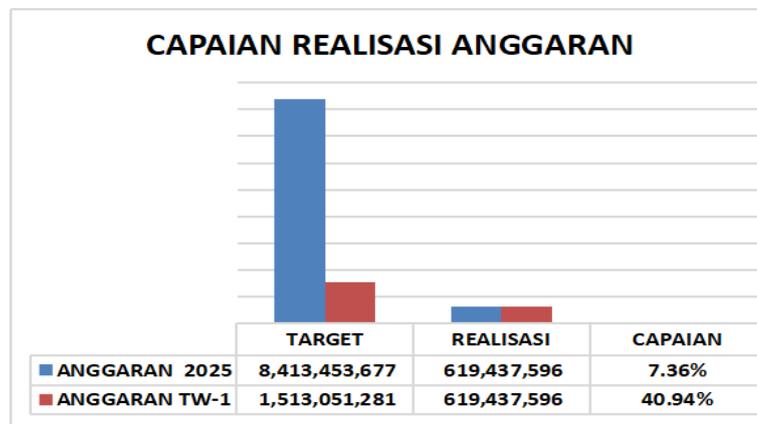
No	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Formula	Target Tahunan	Target / Realisasi / Capaian												Keterangan		
					Target				Realisasi				Capaian						
					Tw-1	Tw-2	Tw-3	Tw-4	Tw-1	Tw-2	Tw-3	Tw-4	Tw-1	Tw-2	Tw-3	Tw-4			
7.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	4 Laporan	1 lap					1 lap					100%				1. Pada Tw-1, terrealisasi sesuai target (1 Laporan)
8.	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang pemerintahan yang terpelihara dengan baik	Jumlah capaian kinerja seluruh sub kegiatan pada kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dibagi jumlah seluruh sub kegiatan pada kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah X 100%	100%	100%					100%					100%				1. Pada Tw-1, terrealisasi sesuai target
8.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara	4 Unit	4 Unit					4 Unit					100%				1. Pada Tw-1, terrealisasi sesuai target (1 Unit Mobil, 3 Unit Motor)

No	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Formula	Target Tahunan	Target / Realisasi / Capaian												Keterangan
					Target				Realisasi				Capaian				
					Tw-1	Tw-2	Tw-3	Tw-4	Tw-1	Tw-2	Tw-3	Tw-4	Tw-1	Tw-2	Tw-3	Tw-4	
	Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	dan dibayarkan pajak dan perizinannya														
8.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	27 Unit	7 unit				7unit				100%				1.Pada Tw-1, terealisasi sesuai target (Laptop, Printer dan AC,
8.3	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Jumlah Gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/di rehabilitasi	1 Unit	0 unit				0 unit				0%				1.Pada Tw-1, Sub Kegiatan belum ditargetkan

## B. REALISASI ANGGARAN

Pagu anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun Anggaran 2025 yaitu sebesar Rp. 8,413,453,677,- (*Delapan milyar empat ratus tiga belas ribu empat ratus lima puluh tiga ribu enam ratus tujuh puluh tujuh rupiah*). Realisasi anggaran sampai dengan triwulan 1 sebesar Rp. 619,437,596,- (*Enam ratus sembilan belas juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus sembilan puluh enam rupiah*) atau 40,94%. Terealisasi dapat dilihat pada grafik berikut ini :

Tabel 3.



### Realisasi Anggaran Berdasarkan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2025

NO	PROGRAM/KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	TARGET SD TRIWULAN 4 (BERDASARKAN ANGGARAN KAS)	REALISASI ANGGARAN S.D 31 DESEMBER 2024		TOTAL SISA ANGGARAN	
				(Rp.)	(%)	(Rp.)	(%)
01	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten / Kota</b>	<b>3.281.107.812</b>	<b>975.194.581</b>	<b>557.020.580</b>	<b>57,12</b>	<b>2.724.087.232</b>	<b>83.02</b>
1.	<b>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>129.437.303</b>	<b>30.823.053</b>	<b>3.500.000</b>	<b>11,36</b>	<b>125.937.303</b>	<b>97.30</b>
1.	Penyusunan dokumen Perencanaan Perangkat daerah	69.133.500	30.823.053	3.500.0000	24,79	65.633.500	94.945
2	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	5.843.000	-	-	-	5.843.000	100
3	Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD	5.843.000	-	-	-	5.843.000	100
4	Evaluasi kinerja perangkat daerah	48.617.803	-	-	-	48.617.803	100
2.	<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>2.244.011.406</b>	<b>773.768.616</b>	<b>472.311.276</b>	<b>61.04</b>	<b>31.511.193</b>	<b>78.95</b>
1.	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	2.160.363.906	756.129.116	466.611.276	61.71	1.693.757.630	78.40

NO	PROGRAM/KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	TARGET SD TRIWULAN 4 (BERDASARKAN ANGGARAN KAS)	REALISASI ANGGARAN S.D 31 DESEMBER 2024		TOTAL SISA ANGGARAN	
				(Rp.)	(%)	(Rp.)	(%)
2	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	83.642.500	17.639.500	5.700.000	32.31	77.942.500	93.19
<b>3.</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>23.888.500</b>	<b>9.101.500</b>	<b>1.900.000</b>	<b>20.88</b>	<b>21.988.500</b>	<b>92.05</b>
1.	Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	23.888.500	9.101.500	1.900.000	20.88	21.988.500	92.05
<b>4.</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>90.400.803</b>	<b>33.676.902</b>	<b>5.200.000</b>	<b>15.44</b>	<b>85.200.803</b>	<b>94.25</b>
1.	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	47.589.803	14.509.902	5.200.000	35.84	42.389.803	89.07
2.	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	42.811.000	19.167.000	-	0,00	42.811.000	100
<b>5.</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>443.014.800</b>	<b>83.569.510</b>	<b>48.012.029</b>	<b>57.45</b>	<b>395.002.771</b>	<b>89.16</b>
1.	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	20.270.00	3.081.000	-	0.00	20.270.000	100
2.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	89.000.000	-	-	0.00	89.000.000	100
3.	Penyediaan bahan logistik kantor	8.608.600	2.946.510	-	0.00	8.608.600	100
4.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	13.440.000	2.688.000	300.0000	11.16	13.140.000	97.77
5.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	8.040.000	1.340.000	1.260.000	94.03	6.780.000	84.33
6.	Fasilitasi kunjungan tamu	13.200.000	2.400.000	2.400.000	100	10.800.000	81.82
7.	Penyediaan rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	290.456.200	71.114.000	44.052.029	61.95	246.404.171	84.83
<b>6.</b>	<b>Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah</b>	<b>158.750.000</b>	<b>12.000.000</b>	<b>-</b>	<b>100</b>	<b>121.650.000</b>	<b>76.63</b>
1	Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional atau lapangan	29.000.000	-	-	0	29.000.000	100
2	Pengadaan Mebel	80.650.000	-	-	0	80.650.000	100
3	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12.000.000	12.000.000	-	0	12.000.000	100
4	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	37.100.000	-	-	0	37.100.000	100
<b>7.</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang urusan pemerintahan daerah</b>	<b>106.855.000</b>	<b>21.905.000</b>	<b>16.637.275</b>	<b>75.95</b>	<b>90.217.725</b>	<b>84.43</b>
1.	Penyediaan jasa surat menyurat	1.795.000	770.000	100.000	12.99	1.695.000	94.43
2.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	43.500.000	10.875.000	8.037.275	73.91	35.462.725	81.52

NO	PROGRAM/KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	TARGET SD TRIWULAN 4 (BERDASARKAN ANGGARAN KAS)	REALISASI ANGGARAN S.D 31 DESEMBER 2024		TOTAL SISA ANGGARAN	
				(Rp.)	(%)	(Rp.)	(%)
3.	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	61.560.000	10.260.000	8.500.000	82.85	53.060.000	86.19
<b>8.</b>	<b>Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah</b>	<b>134.650.000</b>	<b>134.650.000</b>	<b>102.265.000</b>	<b>75,95</b>	<b>32.385.000</b>	<b>24,05</b>
1.	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	24.000.000	6.420.000	6.400.000	99,7	17.600.000	73.33
2.	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	33.250.000	3.930.000	3.060.000	77.86	30.190.000	90.80
3.	Pemeliharaan / rehabilitasi gedung kantor atau bangunan lainnya	27.500.000	-	-	-	27.500.000	100
<b>02</b>	<b>Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</b>	<b>1.734.547.500</b>	<b>71.919.000</b>	<b>32.421.516</b>	<b>45.087</b>	<b>1.702.125.984</b>	<b>98.13</b>
1.	<i>Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ideologi pancasila dan karakter kebangsaan</i>	1.734.547.500	71.919.000	32.421.516	45.087	1.702.125.984	98.13
1.	Pelaksanaan koordinasi dibidang wawasan kebangsaan , bela negara, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan	62.659.000	6.542.500	-	-	62.659.000	100
2	Pembentukan Paskibraka	1.671.888.500	65.376.5000	32.421.516	49.59	1.639.466.984	98.06
<b>03</b>	<b>Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik</b>	<b>1.319.768.265</b>	<b>64.695.000</b>	<b>11.905.000</b>	<b>18.40</b>	<b>1.307.863.265</b>	<b>99.10</b>
1.	<i>Perumusan Kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik</i>	1.319.768.265	64.695.000	11.905.000	18.40	1.307.863.265	99.10
1.	Penyusunan program kerja di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik	76.023.000	16.814.000	2.250.000	13.38	73.773.000	97.04
2.	Pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik	1.184.717.265	26.668.000	9.655.000	36.20	1.175.062.265	99.19

NO	PROGRAM/KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	TARGET SD TRIWULAN 4 (BERDASARKAN ANGGARAN KAS)	REALISASI ANGGARAN S.D 31 DESEMBER 2024		TOTAL SISA ANGGARAN	
				(Rp.)	(%)	(Rp.)	(%)
3.	Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik	59.028.000	21.213.000	-	0	59.028.000	100
<b>04</b>	<b>Program pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan</b>	<b>67.742.000</b>	<b>19.183.000</b>	<b>4.910.000</b>	<b>25.60</b>	<b>62.832.000</b>	<b>92.75</b>
1.	<i>Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan</i>	67.742.000	19.183.000	4.910.000	25.60	62.832.000	92.75
1.	Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di daerah	67.742.000	19.183.000	4.910.000	25.60	62.832.000	92.75
<b>05</b>	<b>Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya</b>	<b>594.943.000</b>	<b>85.143.500</b>	<b>3.040.000</b>	<b>3.57</b>	<b>591.903.000</b>	<b>99.49</b>
1.	<i>Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya</i>	594.943.000	85.143.500	3.040.000	3.57	591.903.000	99.49
1.	Pelaksanaan koordinasi dibidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah	594.943.000	85.143.500	3.040.000	3.57	591.903.000	99.49
<b>06</b>	<b>Program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial</b>	<b>1.415.345.100</b>	<b>296.916.200</b>	<b>10.140.500</b>	<b>3.42</b>	<b>1.405.204.600</b>	<b>99.28</b>
1.	<i>Perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan pemantapan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial</i>	1.415.345.100	296.916.200	10.140.500	3.42	1.405.204.600	99.28
1.	Pelaksanaan koordinasi dibidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik didaerah	209.680.100	38.959.200	7.320.5000	18.79	202.359.600	96.51

NO	PROGRAM/KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	TARGET SD TRIWULAN 4 (BERDASARKAN ANGGARAN KAS)	REALISASI ANGGARAN S.D 31 DESEMBER 2024		TOTAL SISA ANGGARAN	
				(Rp.)	(%)	(Rp.)	(%)
2.	Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di daerah	36.980.500	10.689.500	2.820.000	26.38	34.160.500	92.37
3.	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	1.168.684.500	247.267.500	-	0	1.168.684.500	100
<b>TOTAL BELANJA</b>		<b>8.413.453.667</b>	<b>1.513.051.281</b>	<b>619.437.596</b>	<b>40.94</b>	<b>7.794.016.081</b>	<b>92.64</b>

## BAB IV PENUTUP

Dari hasil pengukuran dan pelaporan terhadap capaian kinerja Triwulan I yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Badan Kesbangpol Tahun Anggaran 2025 dapat disimpulkan bahwa Perjanjian Kinerja memuat 3 (tiga) sasaran strategis dengan 3 Indikator Kinerja Utama (IKU). Laporan Kinerja Triwulan I ini menjadi bagian dari upaya pertanggungjawaban sekaligus menilai kualitas kinerja pelayanan dan mendorong tata kelola pemerintahan yang baik.

Secara umum hasil pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur pada triwulan 1 Tahun 2025 dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Persentase capaian kinerja sasaran strategis-1 yaitu *“Terciptanya Kerukunan Umat Beragama yang Harmonis”* pada triwulan 1 belum ditargetkan, karena pengukuran indeks kerukunan umat beragama dilaksanakan diakhir tahun berjalan (Tw.4);
2. Realisasi kinerja sasaran strategis-2 yaitu *“Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum”* pada triwulan 1 adalah 82,39% dari target 82,39% dengan capaian kinerja 100%.
3. Persentase capaian kinerja program yang mendukung sasaran strategis-3 yaitu *“Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan OPD”* adalah 81,25%;
4. Realisasi anggaran berdasarkan anggaran kas triwulan 1 sebesar Rp. 619,437,596,- atau 40,94 % dan berdasarkan pagu anggaran kas, dan 7,36% berdasarkan anggaran tahunan;
5. Factor yang menjadi penghambat pencapaian realisasi anggaran triwulan 1 tahun 2025 yaitu :
  - a) Terdapat beberapa sub kegiatan yang sifatnya disediakan sehingga penggunaan anggarannya disesuaikan dengan kebutuhan;
  - b) Proses pengajuan spj yang terlambat, sehingga tidak dapat diproses keuangan atau GU;
  - c) Server pada aplikasi keuangan yang selalu error dan over capacity sehingga menghambat pengajuan pertanggungjawaban

## 6. Rekomendasi

Upaya - upaya yang direkomendasikan untuk meningkatkan capaian kinerja Badan Kesbangpol

- a) Percepatan realisasi anggaran
- b) Meningkatkan monitoring dan evaluasi berjenjang terhadap perjanjian kinerja
- c) Pelaksanaan kegiatan sesuai jadwal yang tertuang dalam KAK dan anggaran kas yang telah ditetapkan
- d) Memaksimalkan pengolahan data dan informasi lingkup OPD
- e) Meningkatkan koordinasi lintas sektoral